



Uang Ganti Pemusnahan Sapi Rp 10 Juta Per Ekor

Jumlah vaksin penyakit mulut dan kuku yang didistribusikan masih jauh dari kebutuhan ideal. Sejumlah daerah juga mengantisipasi mobilitas penjualan ternak kurban dari daerah lain.

BOGOR, KOMPAS — Rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo membahas perkembangan dan penanganan penyakit mulut dan kuku menyetujui sejumlah hal. Salah satunya penyiapan ganti rugi Rp 10 juta dari setiap sapi yang terpaksa dimusnahkan.

"Pemerintah akan menyiapkan ganti, terutama untuk peternak UMKM sebesar Rp 10 juta per sapi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, yang diunggah kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (23/6/2022).

Rapat juga menyepakati bahwa di sejumlah daerah akan ada larangan pergerakan sapi hidup. Larangan itu di level kecamatan yang terdampak PMK yang disebut "daerah merah".

"Daerah merah ini ada di 1.765 dari 4.614 kecamatan atau 38 persen. Seluruhnya detail akan dimasukkan dalam instruksi mendagri," ujar Airlangga yang didampingi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.

Presiden Jokowi juga sudah menyetujui struktur satuan tugas penanganan PMK yang akan dipimpin Kepala BNPB. Selaku wakil satgas, antara lain Direktur Jenderal (Dirjen) Peternakan Kementerian Pertanian, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian, se-

juta vaksin. Dengan keterbatasan jumlah dosis, vaksinasi bakal diprioritaskan untuk sentra sapi perah.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar M Arifin Soedjaryana menyatakan, vaksin PMK yang telah diberikan ke Jabar sebanyak 120.000 dosis. Vaksin akan didistribusikan ke sentra sapi perah untuk menekan kerugian.

"Sapi perah yang paling terdampak. Tidak hanya nilai investasi yang hilang karena induknya mati, produksi pun saat ini menurun. Penurunan bisa 80 persen sehingga yang tersisa untuk berproduksi hanya 20 persen," ujarnya.

Namun, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan vaksinasi yang mencapai 1,8 juta dosis. Arifin menjelaskan, pihaknya telah meminta 600.000 vaksin untuk dosis pertama. Satu sapi setidaknya mendapat tiga vaksin. Penyuntikan vaksin pertama dan kedua berjarak satu bulan serta untuk vaksin penguat (*booster*) enam bulan berikutnya. "Untuk populasi, kami meminta 600.000 hewan, mulai dari sapi, kambing, hingga domba. Jadi, kebutuhan di Jabar itu mencapai 1,8 juta dosis vaksin," ujarnya.

Sentra sapi perah yang menjadi prioritas ini di antaranya berada di wilayah Bandung, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Sumedang, Garut, Kuningan, dan Bogor. Vaksinasi juga disertai pendataan sesuai dengan identitas KTP setiap peternak.

Data Kementerian Pertanian

melalui situs Siagapmk.id, Jabar menempati posisi keempat provinsi terdampak PMK. Dari data hingga Kamis (23/6) pukul 14.50, sebanyak 232.731 kasus PMK ditemukan di Indonesia.

Dari jumlah tersebut, 27.907 ekor berasal dari Jabar. Kabupaten Bandung menjadi penyumbang hewan terdampak PMK terbanyak yang mencapai 7.430 ekor. Setelah itu, KBB terdampak 4.897 kasus dan Kabupaten Garut 3.381 kasus.

Tidak hanya dari sentra sapi perah, Arifin menyatakan, pihaknya juga tengah memantau sentra penjualan dan peternakan sapi potong untuk menghadapi Idul Adha, Juli 2022. Untuk itu, Pemprov Jabar menurunkan 1.784 petugas dari tim pemeriksa hewan kurban.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan, semua bekerja sama untuk memastikan sekitar 800.000 hewan kurban yang ditargetkan dipotong tahun ini berjalan lancar dan sesuai harapan. Di samping itu, vaksinasi untuk hewan yang sehat hingga pengobatan hewan yang terpapar PMK juga dilakukan.

"Urusan pangan ini sensitif dan salah satu hal yang bisa melihat kondusivitas pangan itu ada di Idul Adha. Jadi, pastikan tidak ada demo, tidak ada protes, atau kejadian yang viral hanya karena negara tidak sensitif dalam melihat potensi problem di Idul Kurban," ujarnya.

Sementara itu, Daerah Istimewa Yogyakarta bakal mendapat jatah sekitar 4.000 dosis

vaksin PMK. Data Siagapmk.id yang dikelola Kementerian Pertanian, terdapat 5.833 ternak di DIY yang terkena PMK.

Sesuai kebijakan pusat, vaksin itu diutamakan untuk sapi perah usia muda. Jika kebutuhan untuk sapi perah sudah mencukupi, vaksin tersisa bagi sapi potong.

"Untuk vaksin PMK, hari ini DIY mau dikirim. Plus minus 4.000 dosis," kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Sugeng Purwanto.

Jumlah sapi perah di DIY lebih kurang 3.700 ekor. Adapun jumlah total populasi sapi di DIY sekitar 315.000 ekor. Sebagian besar sapi perah berada di Kabupaten Sleman. "Terkait pembagian vaksin, kami akan segera rapat dengan teman-teman pemerintah kabupaten/kota," ujarnya.

Untuk mempercepat vaksinasi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada (UGM). Para mahasiswa dari FKH UGM diharapkan membantu penyuntikan vaksin PMK.

Kepala Bidang Perikanan dan Kehewan di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Sri Pangarti mengatakan, pemkot akan memantau tempat-tempat penjualan hewan kurban menjelang Idul Adha. Hewan-hewan kurban dari luar Kota Yogyakarta harus dilengkapi surat untuk memastikan kesehatannya.

(CAS/RTG/HRS)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanian dan Pangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005